



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MURYANTO AMIN
2. Jabatan : REKTOR
3. NHK : 172511

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 7.800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/110 m² di KOTA MEDAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Bangunan Seluas 54 m² di KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL
SENDIRI Rp. 1.150.000.000
3. Bangunan Seluas 33 m² di KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL
SENDIRI Rp. 1.600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/108 m² di KOTA MEDAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
5. Bangunan Seluas 400 m² di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp.
3.250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 650.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 219.373.620

D. SURAT BERTAHAGA

Rp. 362.649.696

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 3.355.719.541

F. HARTA LAINNYA

Rp. 774.271.293

Sub Total

Rp. 13.162.014.150

III. HUTANG

Rp. ----



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

13.162.014.150

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.